







































Model co-management Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir di Daerah Perbatasan

Model co-management pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama nelayan, tengkulak/toke, dan pemerintah dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar stakeholder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis

terhadap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan co-management dalam pengembangan ekonomi daerah perbatasan akan memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik seperti:

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang aktivitas perekonomian, Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap aktivitas perekonomian, Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dengan model co-management ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah dalam pengembangan daerah perbatasan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena co-management membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah co-management, mengizinkan dan mendukung masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.

## **8. Tahapan Pengembangan Ekonomi Daerah Perbatasan**

Pengembangan pilar-pilar usaha masyarakat di daerah perbatasan dengan menumbuhkan kembangkan usaha-usaha berbasis perikanan, pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, dan pariwisata dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan, maka diperlukan pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat yang tepat. Alternatif pengembangan ekonomi masyarakat daerah perbatasan memerlukan strategi pada upaya diversifikasi usaha masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Diversifikasi usaha masyarakat daerah perbatasan diperlukan karena potensi laut semakin menurun. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi daerah perbatasan sebagai alternatif pembangunan ekonomi sebagai berikut:

### **PENUTUP**

Penganekaragaman dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah, pada bidang usaha perikanan tangkap, yang dimaksudkan untuk membentuk usaha-usaha masyarakat pesisir yang kuat dan terintegrasi dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi, dengan aktivitas: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perikanan tangkap, Penumbuhan usaha bukan berbasis perikanan laut, Pengembangan rantai nilai usaha, Memperpanjang rantai nilai, meningkatkan inovasi, dan penguasaan pasar, Meningkatkan efisiensi rantai nilai, dan mengurangi dominansi toke dalam sistem perekonomian pesisir. Pengembangan dan penumbuhan klaster usaha masyarakat daerah perbatasan, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan

mengembangkan kluster usaha dan industri berbasis sumberdaya lokal, dengan aktivitas: Memperkuat rantai nilai dengan keunggulan lokasi, yang dapat mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif,

Memperkuat keterkaitan antar kelompok usaha dan kluster dalam satu sektor maupun dengan sektor lainnya, sekaligus mendorong kemitraan, sehingga membentuk jaringan serta struktur yang mendukung peningkatan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas, Mendorong tumbuhnya usaha dan industri yang memerlukan pasokan bahan baku dan penolong yang sama, sehingga memperkuat partnership antara usaha dan industri prioritas, terkait, dan pendukung, Memfasilitasi upaya-upaya pemasaran dalam maupun luar negeri, Merangkai kerjasama perekonomian dengan daerah sekitar, sebagai upaya Sinergy Development Area (SDA), yang dimaksudkan untuk pemerataan pengembangan ekonomi masyarakat daerah perbatasan dan memperkuat tatanan ekonomi yang efisien (skala ekonomi) dan daya saing wilayah. Upaya ini dilakukan untuk merangkai kerjasama antar daerah perbatasan dalam satu kluster pengembangan ekonomi masyarakat dengan masyarakat di daerah sekitar, penekanan pengembangan pada setiap tahap atau rantai usaha dan bisnis, yang dapat ditempuh melalui pendekatan sumber bahan baku dan penjualan hasil (produksi).

Implementasi pendekatan ini menjadi penting untuk menata struktur ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang tangguh dengan integrasi wilayah yang terpadu dan saling mendukung. Tahapan pengembangan adalah sesuatu yang diarahkan pada upaya konsolidasi kekuatan ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meraih peluang yang ada, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian struktur dan kekuatan ekonomi masyarakat pada setiap wilayah pesisir dapat dibangun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Dephan, Desember 2003, “Pengembangan Strategi Pengamanan Daerah Perbatasan Guna Penegakan Kedaulatan Negara dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara” Jakarta.
- Dharmmesta, B.S., 1997, Keputusan Strategik untuk Mengeksplorasi Sikap dan Perilaku Konsumen, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, No, 3.
- Harun Al Rasyid Motohandoyo, 2002, Singapura Negara Penadah Hasil Curian Pasir Laut dari Kepulauan Riau, <http://www.rudyct.tripod.com>
- Karim Hings Abdillah., 2000, M endayagunakan Wilayah Perbatasan Dengan Meningkatkan Peran dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraannya Guna Pemantapan Integritas Bangsa. Lemhanas. Jakarta.  
KompasCyber Media, edisi 23 A pril 2002, MasalahPerbatasan dan Profesionalisme Tentara, <http://www.kompas.com>
- KompasCyber Media, edisi 23 Desember 2002, T inakaren, Kemewahan di Perbatasan, <http://www.kompas.com>, Kompas Cyber Media, edisi 24 Desember 2002, KSAL perintahkan “Show TheFlag” di Pulau PulauPerbatasan, <http://www.kompas.com>
- Kompas Cyber Media, edisi 30 D esember 2002, P ulau Nipah Perlu Diselamatkan, <http://www.kompas.com>
- Kompas, edisi 3 Januari 2003, L ima Pulau Lagi Masih Sengketa Dengan Negara Tetangga, Jakarta.
- Kompas, edisi 9 Februari 2003, Delapan Pulau di Perbatasan Miskin, Jakarta.
- Mickael Andjioe, 2001, P engelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, <http://www.Perbatasan.com>
- Nurbaya Siti, 2001, Pengelolaan Perbatasan Negara. <http://www.perbatasan.com>
- Pellindou P. Jack A, 2002. Peningkatan Kerjasama Kerja sama Antar Negara Perbatasan Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.

- Pontianak Post, edisi 3 Juli 2002, S ehari, 200 Truk Kayu Ke Serawak via PLB Entikong, Pontianak.
- Republika Online, 2003, edisi 15 Januari 2003, Pulau Nipah Akan Dikembangkan Untuk Pariwisata, <http://www.Forek.or.id>
- Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatas-an, <http://www.Perbatasan.com>
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 1995, M etodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Tempo, edisi 15 J anuari 2003, P anglima TNI Berjanji Menindak Aparat Yang Terlibat Illegal Logging. <http://www.tempointeraktif.com>
- Tempo, edisi 19 Desember 2002, KSAL: Ada Sejumlah Pulau Kecil Indonesia yang Berpotensi Diklaim Negara Lain, <http://www.tempointeraktif.com>